

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Made Ananda Dwipraseya

Nim. 2114101103

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual; dan (2) untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual meliputi memberikan perlindungan hukum, menyediakan bantuan konseling, memberikan bantuan medis, melakukan upaya pemulihan (rehabilitasi), menyediakan ruangan khusus bagi korban, melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, menjamin hak-hak korban, serta menyediakan sistem penerimaan laporan yang aksesibel dan ramah disabilitas; dan (2) faktor-faktor yang menghambat proses pemberian perlindungan hukum mencakup: kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, ketiadaan anggaran dari pemerintah, tidak tersedianya rumah aman/shelter, hambatan dari korban sendiri, serta minimnya sumber daya manusia penyidik unit PPA Polres Buleleng dan Dinas Sosial.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Disabilitas, Korban Kekerasan Seksual.

***ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE BULELENG
DISTRICT GOVERNMENT TOWARDS PERSONS WITH
DISABILITIES VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN
BULELENG DISTRICT***

By:
Made Ananda Dwipraseya
Nim. 2114101103
Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the role and responsibility of the Buleleng Regency Government towards people with disabilities who are victims of sexual violence; and (2) to identify inhibiting factors in the implementation of these roles and responsibilities. The type of research used is empirical legal research. This study is descriptive in nature using primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, document studies, which will later be analyzed qualitatively. The sampling technique uses purposive sampling which is analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) the role and responsibility of the Buleleng Regency Government towards people with disabilities who are victims of sexual violence include providing legal protection, providing counseling assistance, providing medical assistance, carrying out recovery efforts (rehabilitation), providing special rooms for victims, providing legal counseling and information to the community, guaranteeing the rights of victims, and providing a system for receiving reports that is accessible and friendly to the disabled; and (2) factors that hinder the process of providing legal protection include: lack of public awareness and understanding of law, lack of budget from the government, unavailability of safe houses/shelters, obstacles from the victims themselves, and minimal human resources for investigators at the PPA Unit of the Buleleng Police and the Social Services. Key words: Roles, responsibilities, victims, disabilities, sexual violence.

Keyword: *Role of Government, disability, Victims of Sexual Violence.*